

STUDI PENERAPAN SNI OLEH LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Muti Sophira Hilman dan Ellia Kristiningrum

Abstract

Conformity assessment body (CAB) such as Certification body, inspection and laboratorium has role in quality assurance of goods or services. Application of SNI by CAB may describe development of standard application. At this time, data of SNI application and its constraint by CAB is not known for sure yet. The objective of the research is to know how many SNI has implemented by CAB and reasons and problems that faced CAB in order to implement SNI. Method of the study is a survey method. Discussion in this study using decriptive method, it describes about situation or factual condition. Data collecting tools is by quetioner. Questioner was distributed to CAB that was accredited by KAN, such as testing laboratory, quality system certification body, environmental quality system certification body, product certification body, calibration laboratory and inspection body.

Applying of SNI by LPK is equal to 14.46% SNI applied to amount of total SNI. Amount of SNI applied by testing laboratory is 873 SNI, by calibration laboratory is 210 SNI, 31 SNI applied by inspection body, 134 SNI applied by product certification body, 52 SNI applied by quality management system certification body, 4 SNI applied by HACCP certification body and 5 SNI applied by EMS certification body. The first reason that CAB is not apply SNI that is SNI inappropriate with customer or market need. Cost of treatment and equipments and difficulty of the process accreditation is a major problem of CAB to apply SNI.

Keywords: *Conformity assessment body, Application, SNI*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Nasional Indonesia (SNI) dibuat oleh stakeholder Indonesia sebagai standar nasional hasil konsensus para pemangku kepentingan dan ditujukan untuk menjadi faktor penguat daya saing, pelancar transaksi perdagangan, dan pelindung kepentingan umum. Sejak pertama kali diterbitkan, SNI sudah digunakan dalam lingkungan industri dan perdagangan dan telah mencakup semua sektor, seperti kelautan, pertanian, pertambangan, teknologi informasi, nuklir, dan lain-lain. Kegiatan perumusan SNI tersebut diikuti oleh berbagai pihak yang mencerminkan unsur-unsur stakeholder, yaitu pemerintah, produsen, konsumen, cendekiawan, lembaga riset. Sampai pada akhir tahun 2005, jumlah SNI yang telah ditetapkan mencapai 6.633 judul.

Penerapan SNI adalah kegiatan menggunakan SNI oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan penggunaan SNI ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standar, akreditasi, sertifikasi, dan metrologi. Penerapan SNI dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya jaminan mutu barang, jasa, proses, sistem atau personel sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pihak terkait bahwa suatu organisasi, barang, jasa yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu penerapan standar juga dimaksudkan untuk menjamin peningkatan produktivitas, daya guna dan hasil guna serta perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dalam

hal keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Penarapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk standar yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dipertimbangkan untuk diberlakukan standar wajib. (SSN, 2001)

Penerapan SNI akan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna jika didukung dengan sistem sertifikasi, kalibrasi dan inspeksi yang handal dan dapat dipercaya serta dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional. Dengan demikian lembaga penilaian kesesuaian (LPK) seperti lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium mempunyai peranan yang besar dalam memberikan jaminan mutu terhadap barang dan atau jasa.

Penilaian kesesuaian dapat digunakan untuk memeriksa bahwa produk tertentu bisa memenuhi tingkat mutu dan pengamanan, serta mempermudah konsumen untuk mengetahui keterangan secara tegas dan lengkap mengenai sifat khusus, konsistensi sifat khusus tersebut, dan atau penampilan produk tersebut. Penilaian kesesuaian adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penilaian baik langsung maupun tidak langsung terhadap produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap standar atau spesifikasi terkait telah terpenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, inspeksi, evaluasi, verifikasi, dan jaminan kesesuaian serta registrasi dan akreditasi.

Tujuan penilaian kesesuaian adalah menjamin mutu produk, perlindungan terhadap

kesehatan dan keselamatan manusia, perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan, perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap praktek penipuan, dan perlindungan terhadap kepentingan keamanan yang dianggap sebagai tujuan yang sah.

Lembaga Penilaian Kesesuaian diantaranya yaitu:

a. Lembaga Sertifikasi

Lembaga ini mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian sistem atau produk terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil penilaiannya dinyatakan dengan sertifikat (misal: sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, produk, sistem keamanan pangan (HACCP - *Hazard Analysis and Critical Control Point*))

b. Laboratorium

Untuk laboratorium meliputi laboratorium pengujian dan atau laboratorium kalibrasi yang melakukan kegiatan pengujian dan atau kalibrasi, dimana hasil pengujian dan/atau kalibrasi dinyatakan dengan sertifikat/laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi.

c. Lembaga inspeksi

Lembaga ini mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan atau jasa terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil pemeriksaan dinyatakan dengan sertifikat hasil inspeksi

Penerapan SNI oleh LPK merupakan salah satu gambaran mengenai perkembangan penerapan standar. Permasalahan saat ini adalah bahwa sampai saat ini belum diketahui data yang pasti seberapa jauh SNI yang diterapkan dan bagaimana permasalahan yang dihadapi LPK dalam menerapkan SNI.

1.2 Tujuan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh SNI diterapkan oleh LPK dan mengetahui alasan serta permasalahan dalam penerapan SNI oleh LPK.

1.3 Metodologi

Studi dilakukan dengan metode survey. Pembahasan dalam studi ini dilakukan secara deskriptif yaitu membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian berdasarkan data-data atau keterangan yang faktual. Pengumpulan data

dilakukan menggunakan kuesioner. Pengiriman kuesioner ditujukan kepada lembaga-lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN yaitu laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi sistem mutu, lembaga sertifikasi sistem mutu lingkungan, lembaga sertifikasi produk, HACCP, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi. Kuesioner dikirimkan kepada 412 Lembaga Penilaian Kesesuaian.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada studi ini 412 kuesioner disebar, dan yang memberikan jawaban sebanyak 339 LPK, yaitu 229 Laboratorium Uji, 61 Laboratorium Kalibrasi, 18 Lembaga sertifikasi produk, 13 lembaga sertifikasi sistem mutu, 2 Lembaga sertifikasi HACCP, 2 Lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan dan 14 Lembaga inspeksi.

Dari data yang ditampilkan dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa dari 339 LPK dapat diketahui sebanyak 255 LPK (75%) menerapkan SNI, dan yang tidak menerapkan SNI sebanyak 84 LPK (25%). LPK yang menerapkan SNI diantaranya adalah 182 Laboratorium uji, 36 laboratorium kalibrasi, 17 Lembaga sertifikasi produk, 12 lembaga sertifikasi sistem mutu, 2 lembaga sertifikasi HACCP, 2 lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan dan 4 lembaga inspeksi.

Berdasarkan hasil survey sebagian besar LPK menjawab alasan tidak menerapkan SNI yaitu bahwa SNI tidak diperlukan oleh pelanggan atau pasar (61%). Hal yang perlu juga diperhatikan yaitu dengan alasan LPK menggunakan standar selain SNI yaitu tidak adanya SNI yang sesuai pada lingkup yang dibutuhkan (34%), sesuai dengan permintaan pelanggan (33%) dan persyaratan teknis standar lain lebih sesuai (24%). Data selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 2 dan 3.

Dari gambar 3 terlihat bahwa ada SNI yang persyaratan teknisnya tidak sesuai (24%) perlu mendapatkan perhatian untuk ditinjau kembali. Disamping itu beberapa lingkup LPK belum ada SNI nya (34%) juga perlu ditinjau dan dipertimbangkan untuk dibuat SNI nya.

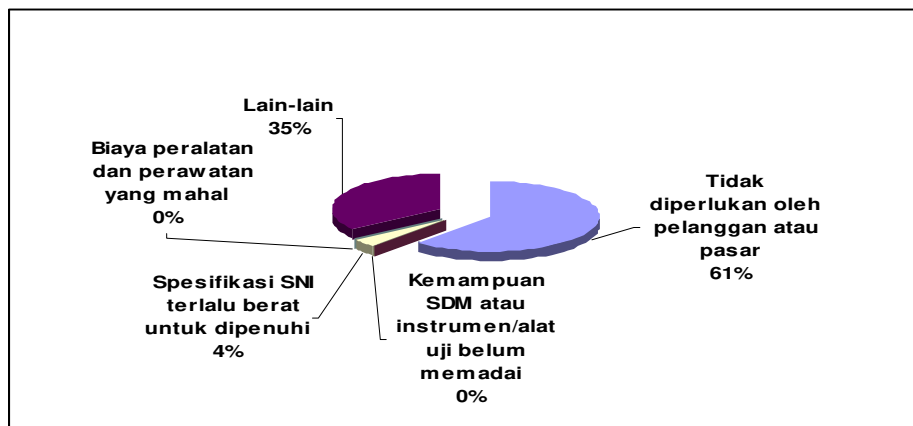
Standar lain yang banyak digunakan LPK yaitu ASTM, JIS, ISO, APHA, BS, AOAC, IEC dengan jumlah standar yang berbeda, seperti disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 1 Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Menerapkan SNI

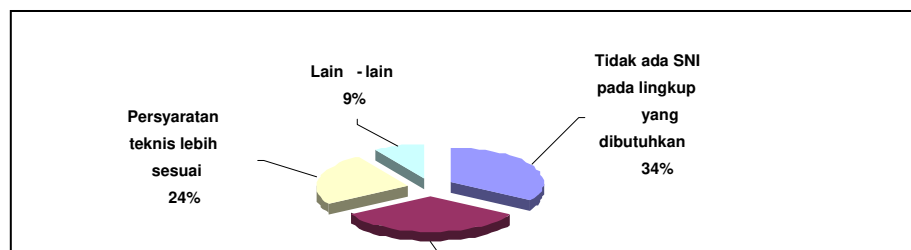
No.	LPK	Menerapkan	Tidak Menerapkan	Jumlah
1	Lab.Uji	182	47	229
2	Lab.Kalibrasi	36	25	61
3	Lem.Sert.Produk	17	1	18
4	Lem.Ser.Sis.Mutu	12	1	13
5	Lem.Sert.HACCP	2	0	2
6	Lem.Sert.Sis.Manj.Lingk	2	0	2
7	Lem.Inspeksi	4	10	14
	Jumlah	255	84	339

Tabel 2 Standar Lain Selain SNI yang Diterapkan

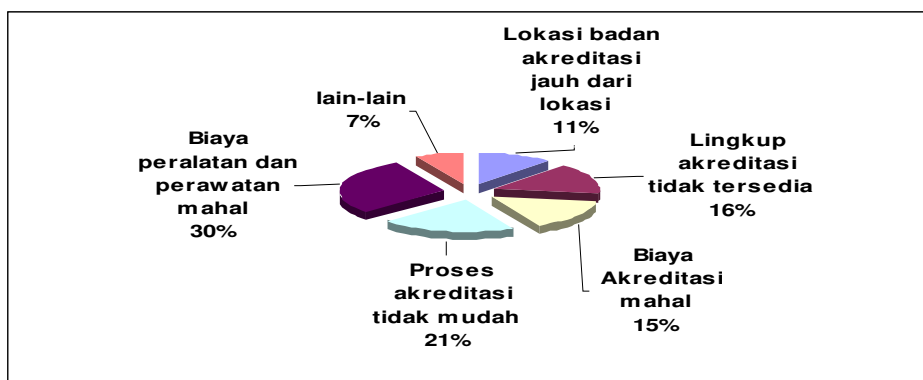
No.	Standar Asing	Jumlah Standar
1	JIS	100
2	JAS	2
3	EN	15
4	BS	47
5	APHA	48
6	ASTM	251
7	ANSI	3
8	DIN	12
9	ISO	58
10	IEC	18
11	ALS	1
12	ASME	5
13	AWS	1
14	API	6
15	BAM	1



Gambar 2 Alasan LPK tidak Menerapkan SNI



Gambar 3 Alasan LPK Menggunakan Standar Lain



Gambar 4 Kendala LPK dalam Menerapkan SNI

Tabel 3 Penerapan SNI oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian

No.	Responden	Penerapan SNI	
		Sertifikat	Non sertifikat
1.	Laboratorium uji	701	172
2.	Laboratorium kalibrasi	205	5
3.	Lembaga inspeksi	27	4
4.	Lembaga sertifikasi produk	130	4
5.	Lembaga sertifikasi SMM	50	2
6.	Lembaga sertifikasi HACCP	4	0
7.	Lembaga sertifikasi SML	5	0
Gabungan		802	157
% terhadap total		12,09%	2,36%

Gambar 4 menunjukkan bahwa biaya peralatan dan perawatan yang mahal (30%), proses akreditasi tidak mudah (21%), lingkup akreditasi tidak tersedia (16%), serta biaya akreditasi mahal (15%) menjadi permasalahan dalam penerapan SNI. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Komite Akreditasi Nasional (KAN) bahwa kemudahan dalam proses akreditasi, perluasan ruang lingkup dan reakreditasi oleh KAN dapat mendorong percepatan kinerja LPK dalam penilaian kesesuaian. Namun semuanya itu kembali pada kemampuan LPK dalam memenuhi persyaratan akreditasi yang meliputi:

manajemen, SDM, dan alat-alat laboratorium yang dimilikinya sesuai dengan standar yang digunakan.

LPK merupakan lembaga yang kegiatannya tidak terlepas dari standar dikarenakan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium mempunyai peranan yang besar dalam memberikan jaminan mutu terhadap barang dan atau jasa.

Dalam studi ini ditetapkan dua kategori penerapan SNI oleh LPK, yaitu LPK yang menerapkan SNI secara utuh serta memberikan/mengeluarkan sertifikat, dan LPK

yang menggunakan SNI untuk kepentingan internal/tidak mengeluarkan sertifikat. Data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa SNI yang diterapkan oleh laboratorium pengujian dengan mengeluarkan sertifikat yaitu sebanyak 701 SNI dan yang tidak mengeluarkan sertifikat sebanyak 172 SNI. Sedangkan pada laboratorium kalibrasi sebanyak 205 SNI dengan sertifikat dan 5 tanpa sertifikat. Data selanjutnya penerapan SNI oleh lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi manajemen mutu (LSSM), lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan (LSML), dan paling rendah ialah lembaga sertifikasi HACCP. Hasil ini tidak bisa dikatakan bahwa LSML dan LSHACCP tidak aktif dalam penerapan SNI, melainkan karena memang jumlah SNI terkait yang relatif sedikit.

Tabel 3 juga menunjukkan jumlah gabungan dari penerapan SNI bersertifikat sebanyak 802 SNI atau sekitar 12,09% dari jumlah total SNI (6633). Sedangkan untuk penerapan SNI non sertifikat sebanyak 157 buah SNI atau sekitar 2,36%. Banyaknya SNI yang diterapkan sudah diperhitungkan dimana tidak terjadi dua kali (duplikasi) perhitungan untuk SNI yang sama yang diterapkan oleh LPK.

Berdasarkan hasil kuesioner diatas penerapan SNI oleh LPK tanpa sertifikasi ini mengindikasikan bahwa permintaan oleh industri hanya dilakukan pada sebagian dari persyaratan mutu SNI, belum terdapatnya ruang lingkup SNI produk yang diminta oleh pihak konsumen (industri), dan industri mengacu pada standar lain dikarenakan pertimbangan tertentu.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan penerapan standar oleh lembaga penilaian kesesuaian adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan jumlah SNI oleh LPK sebesar 14,46% SNI yang diterapkan terhadap jumlah SNI total.
- 2) Alasan utama LPK tidak menerapkan SNI adalah bahwa beberapa SNI tidak diperlukan

dan tidak sesuai permintaan pelanggan atau pasar.

- 3) Kendala/permasalahan utama LPK dalam penerapan SNI adalah biaya peralatan dan perawatan yang mahal dan proses akreditasi tidak mudah

DAFTAR PUSTAKA

1. Nazir, M. Metode Penelitian. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
2. Badan Standardisasi Nasional. 2000. Standardisasi dalam Perspektif Ilmu, Industri dan Perdagangan.
3. Badan Standardisasi Nasional. 2001. Sistem Standardisasi Nasional
4. Herjanto, E dan Bendjamine BL. 2006. Penerapan SNI oleh Pemangku Kepentingan. *Proceeding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi*. Jakarta. Badan Standardisasi Nasional. hlm 209-120.
5. Komite Akreditasi Nasional. 2006. Katalog KAN 2005.

BIODATA

Muti Sophira Hilman, dilahirkan di Bandung tahun 1974. Penulis adalah Peneliti Pertama yang menamatkan pendidikan di Universitas Padjajaran, jurusan Biologi. Saat ini penulis bekerja di Badan Standardisasi Nasional sebagai staf pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi BSN

Ellia Kristiningrum, dilahirkan di Sukoharjo, 20 Februari 1981. Penulis menamatkan S1 jurusan Teknik Kimia di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai staf di Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional.